

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah yang dihadapinya, serta meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupannya ke arah yang lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa merupakan salah satu Upaya pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melalui prakarsa dan swadaya masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain memperbaiki lingkungan, mengembangkan usaha ekonomi dan Lembaga keuangan desa, serta aktivitas lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki hasil produksinya.

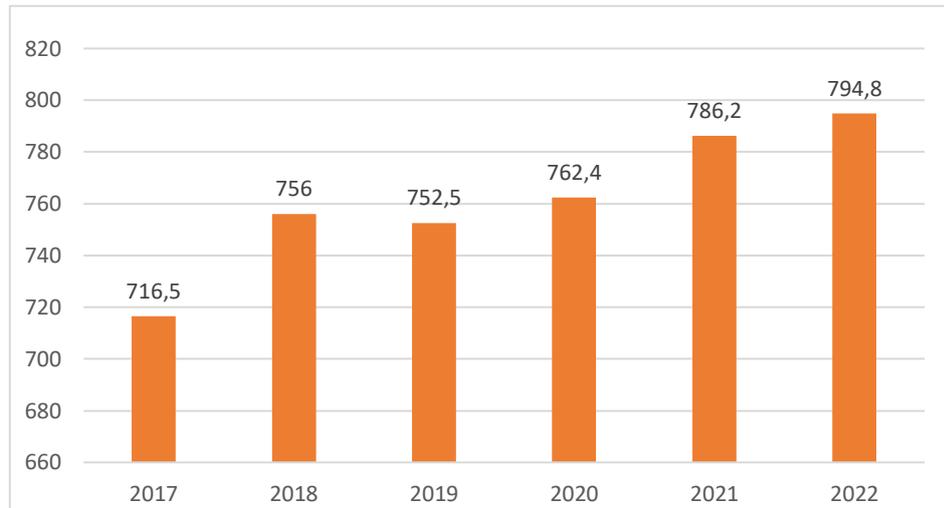
Proses pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu dalam meningkatkan taraf Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam hal mendidik dan memberdayakan masyarakat agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Memberikan Pendidikan dan pemberdayaan tersebut dapat diterapkan dalam segala sektor, yakni seluruh aspek kehidupan manusia; kepada masyarakat umum, yang meliputi rentang kesejahteraan materil hingga non materil; terhadap waktu dan kualitas, yaitu dari jangka pendek sampai jangka Panjang serta peningkatan

kapasitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dan mendorong masyarakat agar lebih aktif bertindak untuk memperbaiki kualitas kehidupannya untuk mencapai taraf yang lebih baik.

Pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Dalam pemberdayaan masyarakat disini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap petani kopi yang ada di Indonesia, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara ke 3 dengan produksi kopi terbesar di dunia.

Indonesia dikenal sebagai produsen kopi terbesar ketiga dunia pada tahun 2022-2023 dengan memproduksi kopi sekitar 11,85 juta kantong. Oleh karena itu, Indonesia memproduksi sekitar 1,3 juta kantong kopi arabika dan 10,5 juta kantong kopi robusta setiap tahunnya. Sebagai negara penghasil kopi terbesar, produksi kopi di Indonesia meningkat dalam dua sampai tiga tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, produksi kopi di Indonesia mencapai 798,8 ribu ton pada tahun 2022, naik sekitar 1,1% dibandingkan dengan hasil produksi dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.1: Diagram Produksi Kopi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data produksi kopi di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka dari itu petani kopi di Indonesia patut mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah karena dari sektor pertanian kopi tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Khususnya para petani kopi yang ada di Desa Loa. Desa Loa ini terletak di dataran tinggi yang sangat cocok apabila dijadikan perkebunan, di Desa Loa sendiri terdapat banyak perkebunan diantaranya ada perkebunan tembakau, kopi, cengkeh dan lain-lain. Desa Loa memiliki jumlah penduduk 10.833 jiwa dengan berbagai mata pencaharian yang berbeda-beda, dari 10.833 penduduk Desa Loa ada 303 jiwa yang bermata pencaharian sebagai petani dan 144 jiwa sebagai buruh tani yang meliputi bidang pertanian tembakau, kopi, dan cengkeh, namun masyarakat disana lebih dominan bermata pencaharian sebagai petani kopi dibandingkan dengan petani tembakau dan cengkeh.

Pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap para petani kopi di Desa Loa, karena pemerintah menyadari bahwa petani kopi tidak hanya memiliki

peluang melainkan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh petani kopi. Tantangan tersebut hadir diakibatkan dari persaingan dunia, dengan adanya komoditi pertanian dari luar, terutama kopi semakin menambah keterpurukan bagi masyarakat petani kopi yang ada di Indonesia. Tantangan yang seringkali dihadapi oleh para petani seperti banyaknya hama yang menyerang tanaman pertanian, fluktuasi pasokan pupuk, kurangnya debit air akibat musim kemarau yang berkepanjangan, irigasi pertanian yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim, pergantian musim yang tidak bisa dikendalikan oleh para petani. Petani juga memiliki tantangan dalam hal lain seperti dibidang teknologi pertanian yang relatif maju sedangkan petani sendiri memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam bidang teknologi tersebut dan petani juga menghadapi dalam hal biaya produksi yang seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya peran dari pemerintah yang mencakupi peran sebagai *Regulator*, *Dinamisator*, *Fasilitator*, dan *Katalisator* yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para petani kopi. (Muh Nurdin et al., 2014)

Tabel 1.1:
Data Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petani Kopi

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Data Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petani Kopi	3	1	3	4	2

Sumber: Laporan Profil Desa

Tabel 1.2:
Data Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petani Kopi Yang Tercapai

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Data Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petani Kopi Yang Tercapai	2	0	3	4	2

Sumber: Laporan Profil Desa

Berdasarkan data tersebut bahwa pemerintah Desa Loa sudah memberikan program terkait pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi petani kopi guna meningkatkan pengetahuan dan produktivitas para petani kopi agar dapat menghasilkan kopi yang lebih berkualitas dan mendapatkan penghasilan yang menjanjikan dari hasil panen yang didapatkan. Program yang diberikan oleh pemerintah Desa Loa yaitu berupa pelatihan yang meliputi pelatihan mengenai pengelolaan perkebunan kopi, pengolahan kopi dari yang berbentuk ceri sampai yang layak untuk dijual, pelatihan penggunaan mesin-mesin pengolahan kopi, pelatihan barista, dan pelatihan pengemasan kopi yang sudah diolah agar menarik minat pembeli.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, diperlukan adanya sikap pemerintahan yang transparan, dapat dipercaya dan demokratis, sementara perkembangan mekanisme harus diberikan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan jangka waktu yang Panjang. Salah satu tujuan utama dari pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang masih berkembang dan belum mempunyai ikatan ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang kuat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dari berbagai uraian serta permasalahan yang telah dipaparkan peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat petani kopi yang ada di Desa tersebut, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintahan Desa Loa terdapat 8 (Delapan) masyarakat Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang berprofesi sebagai petani kopi, tetapi kehidupan masyarakat khususnya petani kopi masih sangat bersenjangan, dimana

pendapatan petani dinilai sangat rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, ditambah lagi dengan biaya produksi yang dirasakan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Hal itu dapat dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat umum khususnya petani kopi, kurangnya pendampingan dari dinas pertanian, fluktuasi harga dan kerugian hasil pertanian, kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, tidak adanya pengembangan sistem dan sarana yang dilakukan guna mempromosikan hasil pertanian, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam memahami teknologi informasi.

Dari berbagai permasalahan petani tersebut, maka tugas pokok dari pemerintah adalah mencari cara untuk dapat memberdayakan para petani, sehingga petani mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan memperoleh penghasilan yang sesuai demi memenuhi kebutuhannya, serta bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga menjadi sebuah kekuatan dalam proses pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi serta mendorong percepatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh petani, kebijakan pemerintah harus memiliki keseimbangan yang cukup kuat untuk mempertimbangkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani pada saat ini, dan kebijakan khusus harus ditetapkan untuk setiap kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh petani. Disamping itu kemampuan masyarakat petani dalam menangkal dampak dari globalisasi masih dinilai kurang baik, selanjutnya ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak memberikan manfaat bagi petani, biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dan hadirnya komoditi impor

hasil pertanian yang disebabkan oleh pasar bebas yang terus menerus menghambat produksi pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini peran pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk dapat memastikan perekonomian lokal akan terus tumbuh, produk pertanian yang dimiliki mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri, dan mampu bekerjasama dengan pelaku pembangunan disektor yang lainnya. Oleh sebab itu, yang menjadi tugas inti dari pemerintah adalah mewujudkan pemberdayaan bagi para petani kopi, sehingga petani mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan memperoleh penghasilan yang sesuai demi memenuhi kebutuhannya, serta bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga menjadi sebuah kekuatan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Peran Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan masyarakat petani kopi dalam menerima pengaruh dari globalisasi belum cukup baik sehingga dibutuhkan pelatihan atau penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan taraf masyarakat sehingga siap ketika menerima pengaruh dari globalisasi.
2. Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi para petani kopi sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kebijakan baru yang dapat mensejahterakan para petani kopi, khususnya dalam hal penerapan pajak tanah pertanian.

3. Biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil harga yang didapatkan oleh para petani kopi.
4. Melemahnya produksi hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat karena adanya komoditi impor hasil pertanian yang diakibatkan oleh adanya pasar bebas.

C. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Loa sebagai Regulator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Loa sebagai Dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana peran pemerintah Desa Loa sebagai Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana peran pemerintah Desa Loa sebagai Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Loa sebagai Regulator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Loa sebagai Dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Loa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Loa sebagai Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a) Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi serta ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam bangku kuliah.
 - b) Sebagai bahan informasi dan pertimbangan atau saran bagi pihak pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
 - c) Bagi Lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai pedoman bagi penulis yang ingin memperdalam atau lebih mengetahui mengenai permasalahan seputar peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembinaan yang dimana masyarakat dituntut untuk proaktif dalam memulai kegiatan sosial guna memperbaiki keadaannya sendiri. Pemberdayaan adalah proses untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat untuk tumbuh. Pemberdayaan masyarakat khususnya bagi petani kopi ini diperlukan mengingat adanya beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para petani kopi seperti, adanya kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi para petani kopi, biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, melemahnya produksi pertanian kopi lokal karena adanya impor komoditi pertanian dari luar negeri, dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan petani kopi dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah dalam proses produksi pertaniannya.

Dalam pemberdayaan masyarakat ini diperlukan adanya peran dari pemerintah yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Arif dalam (Nurdin et al., 2014). Dalam teori tersebut menguraikan peran pemerintah dalam 4 (empat) indikator, yaitu: Pemerintah sebagai *Regulator*, Pemerintah sebagai *Dinamisator*, Pemerintah sebagai *Fasilitator*, dan *Pemerintah sebagai Katalisator*. Jika dilihat dari sudut pandang teori tersebut peneliti beranggapan bahwa teori peran pemerintah ini dapat menjelaskan dan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani kopi.

Disajikan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2: Model Kerangka Pemikiran

PERAN PEMERINTAH DAERAH

- Sebagai Regulator
- Sebagai Dinamisator
- Sebagai Fasilitator
- Sebagai Katalisator

Arif dalam (Nurdin, 2014).



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LOA

Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya untuk memberikan kekuatan terhadap masyarakat dengan taraf kehidupan yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan.
(Suharto, 2010).

